

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMK Assa'adah mengenai Implementasi Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) sebagai upaya terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi dinilai belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan aspek pembiayaan yang di mana dalam pencairan dana belum secara merata pada saat penyaluran kepada siswa sehingga waktunya tidak bersamaan dan tanggal yang tidak menentu setiap bulannya. Selain itu, dalam pencapaian sasaran ketepatan dalam pemilihan calon penerima sudah lebih baik karena adanya regulasi baru mengenai pendataan calon penerima KJP Plus. Tetapi dalam pemanfaatan KJP Plus oleh penerima masih banyak siswa yang menggunakan dana KJP Plus untuk keperluan pribadi di luar keperluan sekolah sehingga dapat dikatakan implementasinya belum berjalan secara optimal.

2. Komunikasi dinilai belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini dilihat dari aspek transmisi yang di mana hanya komunikasi antar bagian (staf dengan pimpinan, pimpinan dengan staf) saja yang sudah berjalan optimal karena setiap bagian sudah melaksanakan koordinasi dengan baik dengan bagian lainnya. Namun, komunikasi antara pelaksana program dengan sasaran program belum optimal karena dalam hal ini kepala sekolah belum menyampaikan hal dengan detail mengenai KJP Plus sehingga masih banyak para penerima yang belum paham dengan informasi yang disampaikan. Selain itu, dalam aspek kejelasan sudah dipahami oleh para penerima KJP Plus sehingga mereka memahami maksud dan tujuan adanya program KJP Plus sendiri. Selanjutnya dilihat dari aspek konsistensi, pelaksana program juga sudah dinilai konsisten dalam memberikan sosialisasi kepada para penerima KJP Plus walaupun masih terdapat kesalahpahaman dalam penyampaian informasi. Hal inilah yang membuat implementasi belum berjalan secara optimal karena komunikasi yang disampaikan belum sepenuhnya dipahami oleh para penerima KJP Plus.
3. Sumber daya di nilai sudah optimal. Hal ini di buktikan dengan aspek staf yang sudah memahami terkait program KJP Plus sendiri dan paham dengan tugas yang akan di dilakukan sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Selain itu, dilihat dari aspek fasilitas juga sudah memadai dan dapat digunakan oleh para penerima KJP Plus sendiri. Sumber daya

yang optimal ini yang mendukung agar implementasi berjalan optimal karena para staf sudah memahami terkait program KJP Plus sendiri dan sudah tersedia regulasi terbaru sehingga meminimalisir kesalahan dalam penyaluran dana KJP Plus kepada para penerima.

4. Disposisi dinilai belum optimal dengan dibuktikan dengan komitmen kepala sekolah yang belum melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala sekolah masih memungut biaya kepada para penerima KJP Plus yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Tetapi jika dilihat dari sisi insentif bahwa tidak ada insentif yang diberikan kepada kepala sekolah oleh pihak dinas karena sudah menjadi tanggung jawab untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan KJP Plus. Hal ini yang membuat implementasi belum optimal karena masih terdapat kesalahpahaman dalam penerimaan informasi yang di terima dan belum konsisten dalam menjalankan tugas menyebabkan implementasi belum berjalan optimal.
5. Struktur birokrasi dinilai sudah optimal karena di Dinas Pendidikan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional (P4OP) sudah memiliki struktur organisasi, selain itu ada pembagian kerja yang jelas sesuai dengan bidangnya. Jika dilihat dari SOP sudah ada SOP tertulis dalam pelaksanaan program KJP Plus. Selain itu juga sudah ada kerja sama dengan pihak eksternal yang mengurus mengenai KJP Plus dan selalu diadakan pertemuan rutin setiap enam bulan sekali atau per

semester. Struktur birokrasi yang baik mendukung agar implementasi berjalan optimal.

6. Berdasarkan aspek implementasi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) diketahui bahwa keempat dimensi mempengaruhi implementasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, berikut adalah implikasi yang dipaparkan peneliti sebagai acuan untuk peningkatan dalam implementasi program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) sebagai upaya terselenggaranya wajib belajar 12 tahun di SMK Assa'adah:

1. Dalam hal komunikasi program KJP Plus kepala sekolah masih dinilai tidak jelas dalam memberikan informasi kepada orang tua siswa penerima KJP Plus, alangkah lebih baik jika kepala sekolah lebih menegaskan apakah informasi yang telah diberikan sudah dipahami oleh para orang tua sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam menerima informasi.
2. Dalam hal sumber daya, dalam program KJP Plus harus mempertahankan agar tetap optimal. Seperti tetap memberikan motivasi kepada para staf dan menjaga fasilitas yang sudah tersedia.

3. Dalam hal disposisi diharapkan kepala sekolah dan para penerima KJP Plus tetap menjaga komitmen dengan baik dalam menggunakan dana yang telah di berikan dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
4. Dalam hal struktur birokrasi, kerja sama yang telah dijalankan oleh pihak eksternal tetap dipertahankan untuk keberlangsungan program KJP Plus yang lebih baik kedepannya.

